

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2024; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
- m. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024;
- n. Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II
Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	46.245.471.435,00	21.731.521.820,20	46,99
Surplus (defisit)	(46.245.471.435,00)	(21.731.521.820,20)	46,99

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024

Uraian	2023	2024	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	45.386.533.636,00	21.731.521.820,20	47,88
Surplus (defisit)	(45.386.533.636,00)	(21.731.521.820,20)	47,88

Tidak ada Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2024

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 21.731.521.820,20 atau 46,99% dari target sebesar Rp 46.245.471.435.

2.1.1 Pendapatan

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
	Pajak Daerah	-	-	0,00%	0,00%
	Retribusi Daerah	-	-	0,00%	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	0,00%	0,00%
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00%	0,00%
	Pendapatan Daerah	-	-		

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2023	2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	Pajak Daerah	-	-	
	Retribusi Daerah	-	-	0,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	
	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	0,00%
	Pendapatan Daerah	-	-	0,00%

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 99,90%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 21.709.021.820,80.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 0,10%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 22.500.000 atau sebesar 79,11% dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 28.440.000. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Oerasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	46.217.031.435,00	21.709.021.820,80		99,90
	Belanja Pegawai	16.542.460.000,00	8.862.662.823,00	53,58	40,78
	Belanja Barang dan Jasa	29.674.571.435,00	12.846.358.997,80	43,29	59,11
	Belanja Hibah	-	-		

	Belanja Bantuan Sosial	-	-		
2	Belanja Modal	28.440.000,00	22.500.000,00	79,11	0,10
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	28.440.000,00	22.500.000,00	79,11	0,10
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja		46.245.471.435,00	21.731.521.820,80	46,99	100,00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	Belanja Operasi	44.510.029.436,00	21.709.021.820,80	48,77%
	Belanja Pegawai	16.236.786.649,00	8.862.662.823,00	54,58%
	Belanja Barang dan Jasa	28.273.242.787,00	12.846.358.997,80	45,44%
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	876.504.200,00	22.500.000,00	2,57%
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	876.504.200,00	22.500.000,00	2,57%
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja		45.386.533.636,00	21.731.521.820,80	47,88

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.910.224.635,00	10.013.511.217,00	52,95	40,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.881.800,00	1.244.800,00	66,15	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	936.000,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	511.000,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	292.400,00	62.400,00	21,34	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	159.800,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.368.600,00	15.041.622,00	40,25	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	940.700,00	65.100,00	6,92	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.542.460.000,00	8.862.662.823,00	53,58	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	457.500,00	-	0,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	457.500,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	457.500,00	-	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	444.900,00	-	0,00	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	379.900,00	340.000,00	89,50	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	379.900,00	-	0,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	444.900,00	-	0,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.113.900,00	510.000,00	45,79	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.113.900,00	345.000,00	30,97	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.113.900,00	345.000,00	30,97	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.113.900,00	345.000,00	30,97	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.113.900,00	345.000,00	30,97	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.113.900,00	510.000,00	45,79	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000,00	-	0,00	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.203.900,00	345.000,00	28,66	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.249.750,00	14.249.750,00	100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.645.629,00	50.227.300,00	51,97	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.114.056,00	10.589.200,00	52,65	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.268.500,00	45.137.400,00	45,93	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	1.440.000,00	50,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.386.000,00	44.780.975,00	58,62	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000,00	2.361.000,00	31,91	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	22.429.122,00	29,91	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.064.000,00	108.077.297,00	43,57	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143.313.600,00	54.147.068,00	37,78	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.236.745.000,00	556.516.960,00	45,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.590.000,00	26.807.400,00	56,33	
	195.608.400,00	194.586.000,00	99,48		
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.335.246.800,00	11.718.010.603,80	42,87	59,11
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52.105.000,00	22.803.000,00	43,76	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.585.454.000,00	1.916.682.557,00	41,80	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	461.089.200,00	120.329.385,00	26,10	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.309.225.000,00	509.670.252,00	38,93	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	11.045.320.600,00	5.156.012.694,00	46,68	
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	113.553.000,00	47.790.228,00	42,09	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	150.000.000,00	-	0,00	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.290.000,00	9.350.000,00	65,43	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	380.686.000,00	138.240.926,00	36,31	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.216.780.000,00	3.797.131.561,80	41,20	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.744.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	46.245.471.435,00	21.731.521.820,80		100,00

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2023	2024	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.845.133.563,00	10.013.511.217,00	53,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.978.000,00	1.244.800,00	62,93
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	959.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	533.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	315.500,00	62.400,00	19,78
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	171.000,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.654.996,00	15.041.622,00	46,06
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.750,00	65.100,00	10,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.236.786.649,00	8.862.662.823,00	54,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	498.000,00	-	0,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	494.750,00	-	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	492.250,00	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	488.000,00	-	0,00
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	411.500,00	340.000,00	82,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	410.250,00	-	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	486.000,00	-	0,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.156.000,00	510.000,00	44,12
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.150.000,00	345.000,00	30,00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.160.000,00	345.000,00	29,74
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.150.000,00	345.000,00	30,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.150.000,00	345.000,00	30,00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.150.000,00	510.000,00	44,35
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	326.692.250,00	-	0,00
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.340.000,00	345.000,00	25,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.660.500,00	14.249.750,00	147,51
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386.733.100,00	50.227.300,00	12,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.654.000,00	10.589.200,00	53,88
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.133.250,00	45.137.400,00	44,19

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	1.440.000,00	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.784.457,00	44.780.975,00	32,98
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.250.000,00	2.361.000,00	32,57
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	31.598.775,00	22.429.122,00	70,98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.474.400,00	108.077.297,00	54,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.331.286,00	54.147.068,00	46,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896.278.900,00	556.516.960,00	62,09
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.475.000,00	26.807.400,00	56,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.624.000,00	194.586.000,00	70,09
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.408.280.073,00	11.718.010.603,80	44,37
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	59.775.000,00	22.803.000,00	38,15
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.268.490.427,00	1.916.682.557,00	26,37
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	303.341.770,00	120.329.385,00	39,67
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.247.243.908,00	509.670.252,00	40,86
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	9.759.165.665,00	5.156.012.694,00	52,83
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	131.927.764,00	47.790.228,00	36,22
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	-	-	0,00
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.010.000,00	9.350.000,00	46,73
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	353.503.344,00	138.240.926,00	39,11
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.257.822.195,00	3.797.131.561,80	52,32
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	7.000.000,00	-	0,00
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	133.120.000,00	-	0,00
	Pembinaan Jagawarga	133.120.000,00	-	0,00
	Jumlah Belanja	45.386.533.636,00	21.731.521.820,80	

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1.1 Pendapatan - LRA	Realisasi 2023	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
3.1.2 Belanja	Realisasi 2023	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.837.962.230,00	5.352.533.176,00
Belanja Gaji Pokok ASN	6.382.828.997,00	3.912.211.300,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	672.267.761,00	404.720.180,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.130.000,00	105.160.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	393.090.000,00	269.820.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	167.035.000,00	66.350.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	450.669.660,00	245.576.165,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.010.608,00	70.625.392,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	95.533,00	62.812,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	519.449.379,00	249.808.859,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.096.146,00	7.049.545,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.289.146,00	21.148.923,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.398.824.419,00	3.510.129.647,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.190.902.684,00	1.476.579.922,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	135.420.333,00	48.565.671,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.785.913.310	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.286.588.092,00	1.984.984.054,00
Belanja Barang	6.217.278.186,00	1.180.223.228,00
Belanja Barang Pakai Habis	6.209.778.186,00	1.180.223.228,00

Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.500.000	-
Belanja Jasa	21.065.221.894,00	11.154.953.644,80
Belanja Jasa Kantor	21.040.971.894,00	11.144.091.644,80
Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	4.862.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.000.000	-
Belanja Pemeliharaan	709.285.250,00	441.285.150,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	431.661.250,00	246.699.150,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	277.624.000,00	194.586.000,00
Belana Perjalanan Dinas	281.457.457,00	69.896.975,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.457.457,00	69.896.975,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	876.504.200,00	22.500.000,00
Belanja Modal Alat Besar	-	22.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	470.000.000	-
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	45.000.000	-
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	158.698.000	-
Belanja Modal Alat Studio/Komunikasi dan Pemancar	86.279.500	-
Belanja Modal Komputer	62.411.700	-
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	54.115.000	-
	45.386.533.636,00	21.731.521.820,80

3.1.3 Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per 30 Juni 2024 (Rp)
	Retribusi Rumah Tangga	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00
	0,00	0,00

3.1.4 Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2023 (Rp)	Jumlah Beban-LO Per 30 Juni 2024 (Rp)
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.837.962.230,00
Belanja Gaji Pokok ASN	6.382.828.997,00	3.912.211.300,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	672.267.761,00	404.720.180,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	166.130.000,00	105.160.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	393.090.000,00	269.820.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	167.035.000,00	66.350.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	450.669.660,00	245.576.165,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.010.608,00	70.625.392,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	95.533,00	62.812,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	519.449.379,00	249.808.859,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.096.146,00	7.049.545,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.289.146,00	21.148.923,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.398.824.419,00	3.510.129.647,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.190.902.684,00	1.476.579.922,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	135.420.333,00	48.565.671,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.785.913.310	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.286.588.092,00	1.984.984.054,00
Belanja Barang	6.201.446.586,00	1.192.814.478,00
Belanja Barang Pakai Habis	6.193.946.586,00	1.192.814.478,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	7.500.000	-
Belanja Jasa	21.065.256.488,00	12.866.226.386,80
Belanja Jasa Kantor	21.041.006.488,00	12.855.364.386,80
Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	4.862.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.000.000,00	-
Belanja Pemeliharaan	726.085.250,00	441.285.150,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	448.461.250,00	246.699.150,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	277.624.000,00	194.586.000,00
Belana Perjalanan Dinas	281.457.457,00	69.896.975,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	281.457.457,00	69.896.975,00
Beban Penyusutan Alat Besar	1.000.000,00	2.107.143
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	1.000.000,00	2.107.143
Beban Penyusutan Alat Angkutan	370.350.642,91	200.925.321
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	370.350.642,91	200.925.321
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.241.389,90	4.870.695
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	5.241.389,90	4.870.695
Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	69.734.920,00	36.682.360
Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	69.734.920,00	36.682.360
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.893.475,00	24.355.763
Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	41.893.475,00	24.355.763
Beban Penyusutan Alat Kedokteran danKesehatan	3.300.000,00	1.650.000

Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	3.300.000,00	1.650.000
Beban Penyusutan Komputer	40.363.225,00	24.500.363
Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	40.363.225,00	24.500.363
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	175.000,00	87.500
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	175.000,00	87.500
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	26.403.750,00	21.553.750
Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	26.403.750,00	21.553.750
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	4.400.000,04	-
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	4.400.000,04	-
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	49.257.867,06	24.628.934
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.257.867,06	24.628.934
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.250.000,00	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	8.250.000,00	-
	45.131.402.699,91	23.774.247.640,63

3.1.5 Aset	31 Desember 2023 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	0,00	663.577.656,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	663.577.656,00
Persediaan	40.778.500,00	28.187.250,00
Barang Pakai Habis	40.778.500,00	28.187.250,00
Peralatan dan Mesin	10.846.997.087,71	10.925.287.510,77
Alat Besar	7.000.000,00	29.500.000,00
Alat Angkutan	5.940.974.998,61	5.989.919.060,85
Alat Bengkel dan Alat Ukur	57.141.149,00	57.141.149,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.127.943.115,40	1.134.789.476,22
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	494.699.046,95	494.699.046,95
Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.500.000,00	16.500.000,00
Komputer	826.931.224,45	826.931.224,45
Alat Eksplorasi	1.750.000,00	1.750.000,00
Alat Keselamatan Kerja	85.715.000,00	85.715.000,00
Peralatan Olahraga	13.200.000,00	13.200.000,00
Gedung dan Bangunan	2.271.538.353,30	2.271.538.353,30
Aset Tetap Lainnya	3.604.200,00	3.604.200,00
Akumulasi Penyusutan	(6.895.577.813,32)	(7.264.522.921,34)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.153.704.291,21)	(6.498.020.465,70)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(741.873.522,11)	(766.502.455,64)
Aset Tidak Berwujud	99.063.500,00	99.063.500,00
Aset Lain-lain	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(99.063.500,00)	(99.063.500,00)
	3.992.197.774,39	4.352.529.495,43

Penambahan aset selama tahun berjalan terdiri atas:

- Adanya mutasi masuk aset tetap lemari besi/metal sebanyak 1 unit @ Rp. 2.323.585,42
- Mutasi masuk alat angkutan darat bermotor 4 unit @ Rp. 15.230.690,56
- Mutasi masuk alat angkutan darat bermotor (sepeda motor kawasaki) 1 unit @ Rp. 35.900.000,-
- Mutasi keluar alat angkutan darat bermotor (sepeda motor kawasaki) sebanyak 4 unit @ Rp. 11.969.675
- Mutasi masuk alat kantor dan rumahtangga (4 tabung alat pemadam Rp4.522.775,40)

3.1.6 Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Utang Belanja		
Utang Belanja Barang dan Jasa	76.898,00	1.711.349.640,00
	76.898,00	1.711.349.640,00

3.1.7 Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Ekuitas		
Ekuitas	3.726.204.225,95	3.992.120.876,39
Surplus/Defisit-LO	(45.131.402.699,91)	(23.774.247.640,63)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	45.386.533.636,00	22.395.099.476,80
Ekuitas Mutasi		
Ekuitas Mutasi	10.785.714,35	28.207.142,87
	3.992.120.876,39	2.641.179.855,43

Bab IV
Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi terdiri dari:

1. Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
2. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 (dua) Seksi:
 - Seksi Penyidikan
 - Seksi Pengendalian Operasional
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan 2 (dua) seksi:
 - Seksi Pengamanan
 - Seksi Deteksi dan Cegah Dini
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan 2 (dua) seksi:
 - Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
5. Bidang Perlindungan Masyarakat dengan 2 (dua) Seksi:
 - Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas: Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum

- Fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Satpol PP;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol PP;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - h. pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Satpol PP;
 - k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Satpol PP;
 - l. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Satpol PP;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Satpol PP;
 - n. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Satpol PP.

Bab V
Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp0

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 21.731.521.820,8 atau 46,99% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 21.709.021.820,8 atau sebesar 46,97% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp16.542.460.000 terealisasi sebesar Rp8.862.662.823 atau 53,58% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp29.674.571.435 terealisasi sebesar Rp12.846.358.997,8 atau sebesar 43,29% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp22.500.000 atau 79,11% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp4.352.529.495,43 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp691.764.906, Aset Tetap sebesar Rp 3.660.764.589,43.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp1.711.349.640, yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 30 Juni 2024 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 2.641.179.855,43.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp0.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO per 30 Juni 2024 sebesar Rp 23.774.247.640,63 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp23.432.885.812,8 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp341.361.827,83.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional per 30 Juni 2024 sebesar (Rp23.774.247.640,63).

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp3.992.120.876,39 merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2024 sebesar (Rp23.774.247.640,63) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan per 30 Juni 2024.

5.2.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp55.790.423,06, Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan (27.583.280,19).

5.2.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 2.641.179.855,43 merupakan ekuitas akhir per 30 Juni 2024.

Kepala SKPD

Octo Noor Arafat, SIP., M.Si.
NIP. 197410101993111001